



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN
SUB UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADAN WILDAN**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN**
3. NHK : **72088**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.433.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/120 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/120 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 843.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di BANDUNG, WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 560 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/120 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 437.000.000**

1. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, BMW 728I SEDAN Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp.



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| 5.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 185.500.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 449.899.573 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 3.505.599.573 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.505.599.573 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.